

## Wawancara dengan Tim Puskomnas JN UKMI UNS



Berikut ini adalah hasil wawancara atau lebih tepatnya *sharing* antara Al-Manär dan Puskomnas FSLDK. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11 Mei 2004 di Sekretariat JN UKMI UNS, lantai 2 Masjid Nurul Huda UNS. Dari Al Manar ada tiga orang yaitu Syahrul Fatriansah, Rahmad Saleh dan Mohammad Fathoni, sementara dari Puskomnas juga tiga orang yaitu Mohammad Eko Wibowo Romayanto (Koord. Puskomnas), Andina Widiastuti dan Kustiyah. Wawancara berlangsung sekitar dua jam dengan ditemani hidangan soft drink dan gorengan (terima kasih kepada Puskomnas yang sudah menjamu kami dengan baik, karena terus terang waktu itu kami berangkat dari Jogja belum sarapan).

Dalam *sharing* tersebut dibahas sekian banyak persoalan penting terkait dengan fokus permasalahan dalam *Special Report* Al-Manär. Mula-mula tentang MCP, dari ide awal sampai pada implementasi serta gagasan tentang *open resource*, nilai pentingnya dan sejauh mana kemudian gagasan itu telah diimplementasikan dalam FSLDK.

Untuk lebih jelasnya dapat anda simak sendiri.

Eko : *Salam*

Eko : Sebelumnya kami dari Tim Puskomnas mengucapkan terima kasih atas perhatian yang besar dari teman-teman Al-Manär terhadap FSLDKN, yang mudah-mudahan dari forum atau diskusi ini dapat memberi masukan-masukan untuk teman-teman LDK dan evaluasi-evaluasi konstruktif untuk ke depan bisa lebih optimal FSLDK itu. Nanti saya serahkan saja ke forum. Mohon maaf kalau pelayanannya kurang, gak ada persiapan dari kami. Mungkin dari akhwat Puskomnas ada yang mau menambahkan?

Kusti : Maaf ga semuanya bisa hadir

Eko : Langsung saja pada yang berkepentingan

Toni : *salam, ta'aruf*

Sahrul : *kenalan*

Eko : Saya Eko, lengkapnya Mohamad Eko Wibowo Romayanto, disini sudah pensiun, demisioner, sampai saat ini masih pegang koordinator Tim Puskomnas

Kustiyah: saya di Jarmus sama komisi LDK

Andina : dulu di Tim Puskomnas, sekarang masih sering-sering bantu

Toni : Kita akan wawancara model sharing

Saleh : Kita modelnya ngalir aja

Sahrul : Kita mulai dari MCP ya. Saya di JS tidak terlalu *concern* dengan MCP. Saya di kesekretariatan jadi ngurusin itu dan MCP terbentuk pas kepengurusan terakhir saya. Belum lama kan tuh. Nah dari pengamatan subjektif saya, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan selanjutnya, terkait dengan peran MCP. Kalau saya buat di ikhtisar, MCP ada poin-poin penting latar belakang, tujuan, dan target. Latar belakang kita sudah paham, karena kebutuhan FSLDK ini terhadap permasalahan yang perlu untuk direspon. Mungkin nanti akan mengerucut pada peran, sejauh mana peran MCP selama ini terhadap fungsi tadi, responnya, kalau ada kendala apa saja, dan kalau ada solusi seperti apa.

Saleh : Kita mulai dari yang umum saja. Jadi kalau kita membaca dokumen kan hanya sebatas bacaan ya, kita ingin dapat info yang riil dari teman-teman Puskomnas sendiri. Dari idealisme awal, terus sekarang dah satu tahun, konsepnya dah bagus, itu sejauh mana poin-poin yang diidealkan bisa terimplementasikan, kata kunci persoalannya apa dan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Mungkin gitu dulu aja.

Eko : untuk MCP, itu lahir bulan Oktober 2002, sesudah rapat BP di sini saat itu BP Nasional. Kita *mem-breakdown*, jadi berawal dari rekomendasi FSLDK Nas. Ada 3 komisi, masuk ke pembahasan isu nasional, di sana banyak sekali rekomendasi yang sifatnya penyikapan-penyikapan terhadap berbagai isu, dari kristenisasi, syariat Islam, sampai moral, sampai jilbab dan seterusnya, musuh global umat Islam. Nah disana, dalam pembahasan kita mengambil benang merah bahwa ini perlu ada semacam *center*, dari pengelola sampai *out put* isu. Yang akhirnya muncul ide Media Center Puskomnas. Jadi intinya MCP itu mau digunakan sebagai wahana penyikapan terhadap rekomendasi FSLDK Nasional. Terus ditunjuk MCP, JS UGM dengan konsep masih *blank*. Jadi saat itu masih arahan global saja. Dia tujuannya untuk mengelola isu-isu nasional, MCP. Setelah itu selesai, JS UGM dan UNS coba untuk merumuskan konsep dari tataran umum sampai

teknis, bagaimana MCP bisa berjalan. Saat itu konsep jadi, dan bulan Juni akan mulai digerakkan. Juni 2003. Setelah itu dengan berbagai permasalahan, terutama yang paling kini mungkin masalah internal di JS, saya juga kurang tahu, yang kemudian, kekurangan SDM mungkin di MCP, yang kemudian cukup menghambat kerja-kerja MCP. Dan untuk isu-isu nasional sementara masih, selama ini dihandle langsung oleh , ya sebagian besar ya, ada beberapa yang sudah coba dihandle MCP, tentang pengelolaan MCP itu. Sebagian besar masih ditangani Puskomnas secara langsung. Sebagian besar. Jadi ga berhenti gitu, dengan agak MCP masih dalam tataran apa ya, ya kami memahaminya. Masih tataran proses, meskipun konsep sudah jadi, ternyata implementasi masih kesulitan, dari datangnya isu, yang sebenarnya isu itu gak harus dari Puskomnas, MCP bisa cari sendiri data dari berita-berita. Dan sebenarnya gak cuma reaktif, kalau bisa memunculkan isu-isu juga terkait rekomendasi isu-isu itu. Misalnya tentang kristenisasi, *blow up* penyadaran masalah pemurtadan, masalah syariat Islam, bagaimana bisa *terblow up* penyadaran ke masyarakat agar memahami, ya pentingnya syariat Islam. Sebenarnya seperti itu, tapi saat ini masih *dihandle* Puskomnas, dan Puskomnas yang ditangani banyak, sehingga kita cenderung masih reaktif. Jadi belum bisa memunculkan isu sendiri, terus *ter-blow up*, itu kita belum bisa. Karena kita ada keterbatasan sumberdaya. Puskomnas juga ngurusinnya gak cuma itu. Biasanya cuma *di-handle* oleh komisi isu, komisi isu nasional di Andina dulu. Sekarang masih cuti, mau concern dengan yang lain. Ya itu dulu mungkin untuk gambaran umum diawalnya.

Saleh : ada beberapa hal yang sempat saya catat, pertama sebagian besar *dihandle* Puskomnas ya, nah itu apakah termasuk beberapa hal yang lumayan simple seperti penyikapan terhadap Amerika, selama ini, itu prosesnya disini ya?

Eko : ya, prosesnya disini. Jadi selama ini masih prosesnya disini. Jadi pengolahan isu sampai pernyataan sikap itu masih, ya bisa dilihat di tulisan saya yang didepan itu, di komisi-komisi, secara umum tergambar disitu. Ya baru itu yang bisa kita lakukan ya, jadi tulisan saya yang menggambarkan Pasca FSNas 12 di Padang, kira-kira itu yang dikerjakan Puskomnas. Untuk masalah MCP memang kita akui, kita juga bisa memahami belum bisa benar-benar optimal.

Saleh : jadi memang secara objektif ini ya, temen-temen JS itu belum melakukan ini ya, yang mendapat amanah MCP itu.

Eko : ya karena kendala-kendala tadi, hambatan-hambatan internal yang, kami kurang tahu juga ya, internalnya juga saya gak punya wewenang atau kekuatan untuk tanya internalnya seperti apa, saya juga ngurus masalah dalam. Tapi mulai akhir-akhir ini kita evaluasi, bahkan kita mau beberapa kali evaluasi ya, mungkin JS sangat sibuk ya, agenda-agenda internal cukup banyak dan besar-besar.

Bukan berarti ya, saya yakin ini teman-teman JS lebih tahu, dan bukan berarti kita menyangkan atau apa, tapi kita bisa memahami ada masalah internal, kita juga punya masalah internal, yang mungkin juga butuh konsentrasi.

Saleh : Tapi kalo boleh kami tahu, *report*, laporan resmi dari JS itu ada nggak? Informasi kenapa tidak bisa, belum bisa optimal menjalankan MCP itu, ada nggak informasi resmi dari JS, jadi kendala-kendalanya seperti ini, problemnya seperti, sehingga kita perlu dapat masukan seperti ini, dan seterusnya, sudah sempat, dari JS-nya sendiri?

Toni : Konfirmasi langsung dari ketuanya atau lembaran surat tertulis.

Saleh : Jadi kami menanyakan sebuah klarifikasi mekanisme, mungkin seperti itu

Andina : Kebetulan koordinator MCP yang pegang akhwat ya, jadi kami banyak ngobrol juga. Tapi dari awal yang perlu dipahami bahwa jaringan FSLDK itu bukan sebuah organisasi. Jadi ketika pertanggungjawabannya itu sangat berbeda dengan sebuah organisasi, harus dengan bukti tertulis, *report* formal seperti itu. Dan kami juga memakluminya, sehingga biasanya laporan-laporan formal semacam itu biasanya disampaikan informal. Jadi forum chatting mungkin ya yang paling sering kita gunakan, kita bisa evaluasi semacam itu, hambatan-hambatannya sejauh mana, ataupun via telpon biasanya kita hubungan sama MCP. Cuma kalo yang kemarin sempat disampaikan, memang kondisi internal yang agak susah untuk mengelola sebuah MCP. Karena harapan kita kan mungkin kalo dipandang dari sebuah idealisme, MCP yang sekarang berjalan memang masih cukup jauh ya, tapi bagi saya yang kemarin masih cukup banyak berinteraksi, kita masih punya sebuah harapan penting. Nanti MCP ke depan, minimal dari Puskomnasnya JN UKMI ini bisa melahirkan sebuah gebrakan baru, karena memang sebelumnya MCP ini kan ngga ada ya, jadi benar-benar baru, dan saya pikir membuat sebuah wajah

baru, sebuah wadah baru itu memang membutuhkan proses. Dan selama ini kita evaluasi terus ya ternyata masih banyak kurang dimana, semacam itu, dan saya pikir tidak masalah ketika MCP itu memang, memang diharapkan MCP itu bisa bantu kerja-kerja kita yang di isu-isu Nasional, bisa mengurangi minimal kerja tim isu, karena memang sebenarnya yang digarap oleh tim isu kan tidak hanya MCP saja, mungkin ada.. disini kalo temen-temen tahu, kayak JAMAAT itu kan seharusnya masuk kerja-kerja tim isu. Makanya MCP itu sebenarnya diharapkan bisa bantu kerja kita. Tapi karena kondisi yang tidak mungkin maka banyak sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Akh Eko, kita banyak yang *handle* dan saya pikir gak masalah. Karena meski pun dari MCP pun ketika bentuknya instruksi atau rekomendasi itu kan masuknya ke Puskomnas dulu. Jadi kayak apa ya, MCP itu nanti lebih ke jaringan di luarnya, tapi kalo rekomendasi ke LDK tetap melalui jalur Puskomnas. Melalui milist dan sebagainya. Melalui jalur resmi yang biasa kita gunakan. Puskomnas ke Puskomda semacam itu. Ketika pun MCP sampai saat ini belum secara konkret bukti kerjanya belum banyak kita lihat, tapi ketika itu bisa dilakukan oleh tim isu nasional, saya pikir tidak terlalu bermasalah semacam itu. Ya mungkin itu bisa banyak masukan buat ke depan untuk MCP itu sendiri. Mungkin itu.

Eko : Yang jelas untuk MCP kita punya idealisme dan harapan besar untuk benar-benar bisa menjadi itu. MCP. Jadi pusat pengelolaan isu, terus hal-hal yang terkait khususnya komisi A, Isu-isu umat Islam secara umum.

Sahrul : Kalo saya boleh *flash back*, kira-kira apa sih yang melatar belakanginya mengapa MCP itu diberikan ke JS, atau terpisah gitu dari Puskomnas.

Eko : Yang jelas tadi, untuk apa ya, bisa meringankan kerja Puskomnas. Karena Badan Pekerja ya, kita bentuk untuk bisa membantu kita. Sehingga cukup merata, ada pembagian kerja antara BP dengan Puskomnas. Itu kemarin juga sempet, apakah di Jakarta atau Jogja. Kata temen-temen *mboke' center* ya di Jakarta gitu, tapi temen-temen di Jakarta ada pertimbangan lain, di Jogja saja.

Sahrul : Pertimbangan Jakarta apa, kok tidak Jakarta saja?

Eko : Yang jelas biar pemberdayaan saja, kalo teman-teman di Jakarta sudah terlalu sering mungkin ya mendapatkan amanah-amanah seperti itu. Kurang tahu tapi, saya agak lupa.

Andina : Yang jelas ketika kemarin, kenapa milih JS, JS kan punya *bargaining position* ya, dibandingkan LDK-LDK lain. Saya pikir nama UGM bisa mewakili nama LDK ketika kita pasang nama JS. Kenapa harus muncul MCP, selama ini yang kita garap dari tim isu hanya sekedar sikap yang reaktif terhadap isu-isu yang ada. Dan kita kan menginginkan isu itu kita bisa ikut mempengaruhi isu global yang ada, jadi kita bisa memunculkan isu itu. Ketika memunculkan isu itu membutuhkan proses, sebuah mekanisme yang cukup panjang. Mengelola sebuah isu kan membutuhkan skill seperti itu, sebuah konsentrasi intensitas yang lebih banyak, daripada sekedar menyikapi isu-isu yang ada. Kalo antum pernah lihat, disini kan yang ada banyak yang sifatnya reaktif kan, nah kita ingin merubah paradigma itu sebenarnya. Dari FSLDK sebelumnya, yang kita lihat kan isu-isu yang ada yang insidental dan sangat reaktif sekali ya, kalo kita bisa memanfaatkan misalnya MCP itu bisa kita memanfaatkan ketika benar-benar ingin merubah paradigma itu. Kenapa gak di UI, kalo gak salah tahun 2000 UI pernah jadi *Center of Crisis* ya?

Eko : *Center of crisis* untuk kemanusiaan di Ambon kayak gitu. Idenya memang dari sana. Cuma *Center of Crisis* itu masih sempit sekali ya, cuma masalah-masalah krisis-krisis kemanusiaan seputar umat Islam. Kalo sekarang lebih luas lagi, terkait isu-isu umat Islam yang lain. Moral sampai syariat Islam, yang ada di rekomendasi FSLDK Nasional.

Saleh : Saya melihat teman-teman Puskomnas dah punya alur logika yang bagus banget ya, jadi selama ini yang dirasa cenderung reaktif itu pengen ada pihak yang *concern* ya, mengelola itu. Sehingga gak sekedar reaktif tapi kalo bisa bahkan memunculkan isu. Saya menangkapnya begitu. Jadi biasanya kalo ada kasus, kemudian aksi, tapi kita mengolah semua informasi yang ada kemudian dari pengolahan itu bahkan bisa menggulirkan itu. Itu yang saya tangkap, benar gak?

Eko : Idealnya kita punya pemikiran seperti itu, pemikiran ideal dan tentunya butuh proses, temen-temen LDK.

Saleh : Kalo sudah sampe situ, saya pengen konfirmasi beberapa hal. Sejauh mana kontrol dari Puskomnas ke JS selaku pengemban MCP. Walaupun tidak ada hubungan struktural seperti itu ya, tapi seorang Muslim kan ada dimensi amanah, dan amanah melebihi sekedar sebuah tuntutan formalitas dan seterusnya. Nah amanah itu kalo diturunkan kan kita bicara soal mekanisme, itu poin *pertama*. Jadi

yang saya tanyakan, pernah gak, ada diskusi yang benar-bener serius dalam hal ini dari JS dan Puskomnas mengenai keterbatasan yang ada, problem yang ada sehingga benar-bener terbuka. Karena kami dari Al-Manär mikir bahwa sebuah keterbukaan, kejujuran itu menjadi kata kunci. Terus yang *kedua*, selama ini komunikasi dengan JS lebih banyak lewat yang informal ya, telpon, chatting dan seterusnya. Tapi *report* formal gak ada. Itu bisa dimaknai positif atau gak ada masalah dalam artian kerja biasa, tapi mungkin kalo kami boleh menyajikan sudut pandang yang lain ya, itu dokumentasi, menjadi penting untuk sebuah proses evaluasi. Evaluasi internal sekarang, maupun sebuah referensi bagi generasi yang akan datang. Apakah memang benar-bener ga ada laporan formal?, lalu chatting, dll itu ada dokumentasi yang bagus? Karena yang akan datang pun bisa jadi FS akan mengulangi hal yang sama, karena tidak ada dokumentasi yang bagus.

Eko : Kontrol terhadap MCP kita sebenarnya rutin ya, ada komisi isu yang memang mengontrol semua. MCP, JAMAAT, PKS, ada tim. Dan untuk pembicaraan serius, di awal konsep kita secara serius terlibat. Dan untuk kontrol, kita silaturahmi juga kita beberapa kali membicarakan MCP. JS juga beberapa kali kesini. Tapi untuk laporan formal memang kita tidak ada. Cuma, apa-apa yang telah dilakukan, itu terdokumentasikan. Jadi penyikapan MCP sudah ada, meskipun sebagian besar masih di-*handle* Puskomnas. MCP sudah kita minta meng-*handle* beberapa hal, misalnya RUU Sisdiknas itu yang *handle* JS. Untuk dokumentasi kita Insya Allah lengkap ya, karena itu data internal kita yang kita gunakan untuk evaluasi internal. Ada untuk chat, milis, semua kita punya datanya. Meskipun masih butuh pembenahan kita harus lebih merapikan lagi. Perlu kita kemas dalam hasil yang lebih konkret.

Andina : kontrol terhadap MCP beberapa kali kita melakukan. Terakhir secara resmi Desember. Terus kemarin kita ketemu juga pas FSLDK Daerah, di UPN, Februari. MCP tentang pembahasan bulletin MCP. Kalo secara resmi kita kunjungan ke JS sendiri terakhir bulan Desember. Sebelumnya juga beberapa tim puskomnas secara intens ya, kalo kemarin sempet ngomongin Jarmus, tidak hanya ngomongin MCP. Kalo sebelumnya benar-bener ngomongin MCP ya, konsep awal untuk MCP. Jadi sebetulnya kalo kontrol sering kita lakukan. Cuma ya kondisinya Insya Allah kita tau lah.

Eko : Yang sering ketemu, akhwat. Dan kita punya program terakhir untuk MCP itu Bulletin Nasional tentang info-info LDK. Sekarang masih digarap, JS yang garap, input data dari kami, dari Puskomnas.

Toni : Saya punya pertanyaan satu hal ya, mengapa yang MCP adalah akhwat?

Eko : Kurang tau ya, internal JS.

Andina : Kalau yang kemarin emang akhwat, tapi sebelumnya ikhwan. Kebetulan satu tahun itu saya juga yang intens. Kebetulan sering ketemu sama ukhti Tia juga, di beberapa forum. Ya udah, untuk permasalahan MCP kita pegang semacam itu. Dan saya pikir itu tidak terlalu bermasalah ya, karena kemampuan analisis dan sebagainya, saya pikir ketika kenapa ukhti Tia ditunjuk pun yang saya lihat kemampuan beliau juga tidak diragukan semacam itu. Tidak kalah dengan yang ikhwan. Saya pikir gak masalah, insya Allah cukup bisa.

Eko : Gak tau di JS diserahkan ke eksternal, MCP.

Salah : Mungkin ini ya, sebetulnya informasi sudut pandang JS insya Allah kami ngerti. Adi ke Tia, faktor objektif maupun politis, kami ngerti banget. Kami pengen dapat informasi dengan pendekatan mekanisme, misalnya sebuah perusahaan, saya bos perusahaan, kemudian departemen yang ada dalam perusahaan sedang..... belum pernah ada informasi yang lebih detail, keterbatasan sejauh mana, itu emang belum nyampe ya?

Eko : Ya kita itu kalo bicara perusahaan, kalo saya tanya internal ini mengapa kok seperti ini kan seperti ngobok-obok. Dan amanah ini kan bukan amanah personal, tapi JS. Jadi JS mau mengemban amanahnya sebagai MCP, membentuk tim atau apa gitu, itu sepenuhnya terserah JS. Kayak kita mendapat amanah Puskomnas, sebenarnya terserah UKMI mau dibentuk seperti apa, sekarang kita bentuk tim Puskomnas, seperti itu.

Sahrul : Kita menyadari masing-masing mempunyai keterbatasan, dan saya sepakat keterbatasan itu tidak perlu diungkapkan. Tapi dalam konteks penerimaan amanah yah, terus terang saya dulu yang termasuk tidak setuju MCP ke JS, karena ngerti kondisi di dalam. Tapi karena diterima ya konsekuensinya, amanah tadi ya, fungsional mungkin bukan struktural. Se jauh mana sih JS sebagai pengelola MCP dan BP Puskomnas itu sudah berusaha menutupi kelemahan masing-masing. Dengan cara membuat mekanisme yang bisa menjamin atau membantu

keterbatasan tersebut tertutupi. Konsep MCP yang disepakati bersama mungkin diasumsikan sudah bisa mengcover kelemahan masing-masing.

Eko : kalo untuk menutupi kelemahan atau kekurangan kita tadi, langsung handle untuk menyikapi isu-isu itu. Sementara kita lakukan. Artinya ga berhenti gitu lho, dengan ada tidak, dengan masih prosesnya MCP, kita tetap jalan. Jadi kita anggap dan pahami bahwa MCP sekarang masih proses. Sampai sekarang kita masih proses mencari yang tepat bagaimana program-program MCP, disisi lain untuk isu-isu yang cepat berjalan itu bagaimana bisa cepat kita sikapi.

Sahrul : Punya target gak, Puskomnas, sampai kapan MCP bisa *established*?

Eko : Kalo target awal MCP jalan itu Juni 2003 ya. Implementasi kita masih berjalan bersama-sama gitu. Jadi belum secara sepenuhnya MCP itu *handle* semuanya. Karena dengan keterbatasan yang dimiliki masing-masing jadi masih saling menutupi. Usulan-usulan juga, MCP sering kasih usulan ke kita, untuk isu ini gimana, jadi kita mekanismenya itu masih, sebenarnya final itu masih di Puskomnas. Jadi MCP itu pengelola, terus Puskomnas ACC, ok.

Saleh : kalo simpelnya ada isu, entah dimunculkan oleh MCP sendiri maupun input dari Puskomnas itu diolah MCP, habis itu masuk ke Puskomnas. Simpelnya kan seperti itu. Ketika mekanisme tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan itu, kebijakan yang ada adalah biarlah ruang dan waktu berproses bagi MCP. Poin yang kedua, karena isu-isu itu terus mengalir dan harus direspon secara cepat maka diambil oleh Puskomnas. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap.

Eko : Ya kita masalah koordinasi tetap ada ya sama MCP. Artinya sikap kita, MCP mesti dapat.

Saleh : Tapi mereka tinggal terima kan, bukan pengolahnya

Eko : Ya

Saleh : Ok, yang ingin saya tanyakan, langkah pengambilalihan lagi oleh Puskomnas karena *startnya* kan diberi, diamanahkan ke JS, kemudian karena kondisi itu diambil alih oleh Puskomnas untuk merespon isu dan seterusnya itu lewat sebuah *statement* yang eksplisit atau karena lihat gak jalan kemudian diambil gitu aja, atau memang, oh kita.. dengan bahasa yang enak ya, karena kayak gini... gimana?

Eko : Kita memahami ya, sangat memahami kondisi yang ada, jadi gak ada eksplisit ini kita *vacuum* kan, itu enggak, jadi MCP biar tetep berjalan, dan ada evaluasi-evaluasi bagaimana MCP selanjutnya, gitu ya.

Andina : Biasanya kan pengambilan kayak mungkin isu-isu yang besar, kayak pemilu dan sebagainya itu kan pembahasan tidak terbatas pada MCP dan Puskomnas saja Akh, biasanya kita juga melibatkan bantuan dari BP puskomnas yang lain. Melalui beberapa forum...begitu kan? Kebetulan ketemu terakhir di Jakarta itu ya Akh. Jangan diartikan kalo *chatting* sekedar *chatting*, bukan. Itu anggap saja sebuah *syuro'*, yaitu emang ada keputusan-keputusan tidak sekedar ngobrol. Jadi disitu malah keputusan-keputusan seperti itu justru banyak didapatkan dari forum-forum *chatting* itu. Biasanya memang seperti itu ya Akh.

Eko : Jadi untuk penyikapan isu-isu yang cepat itu Puskomnas juga gak sendiri sebenarnya. Disamping ada MCP juga ada BP yang lain. Nah itu di forum *chatting*. Jadi tiap dua pekanan kita rutin ya, atau bahkan sepekan sekali kalau ada agenda mendesak untuk penyikapan isu nasional. Jadi enggak otoriter ya, tapi kadang kalau gak sempat komunikasi kita langsung bentuk sikapnya seperti ini, kadang seperti itu. Kadang dibicarakan di tingkat BP di *chatting*, UGM juga datang misalnya. Kadang kita ketemu langsung. Yang paling sering lewat *chatting* ya, untuk agenda pemilu kemarin, kita ketemu di Jakarta. UGM, UNS, ITB, UI sama Unand. Ketemu, kita bahas sikap LDK seperti apa, yang kemudian ada tema besar yang diangkat LDK dan kita secara serentak membuat sikap nasional LDK seperti ini.

Toni : Kalo saya boleh tahu, pada FS Nas apa yang dibahas

*Toni membandingkan dengan FS-nya HI*

Eko : Untuk FSLDK Nas, ada tiga komisi, bukan pertanggungjawaban, jadi kita pandangan umum aja. Apa ya namanya, penyampaian pandangan umum Puskomnas gitu. Jadi menyampaikan selama ini perjalanan LDK seperti apa disampaikan ke forum. Jadi bukan forum kayak Musyawarah Anggota atau Musyawarah Besar, itu LPJ terus diterima ditolak, itu enggak. Karena kita forum, tidak ada ikatan struktural, maka pandangan umum aja dari Puskomnas, terus setelah itu ada pembagian komisi-komisi, yang itu merupakan kebijakan kegiatan nasional ya, jadi ini dua tahun ke depan kira-kira Puskomnas melaksanakan ini.

Dan ini memang diamanahkan ke Puskomnas. Ada komisi A, komisi B, komisi C. A isu-isu nasional, B ke-LDK-an, C Jarmus, disitu sudah saya tuliskan dengan berbagai derivasinya. Misalnya isu-isu nasional apa yang disikapi, latarbelakangnya, sebagainya, itu disepakati secara bersama disana. Disamping itu juga ada acara-acara suplemen ya, untuk up grade juga, untuk LDK-LDK yang peserta ya.

Toni : FS Nasional jadi ajang pemberdayaan, agar antara pusat dan daerah tidak terjadi ketimpangan.

Eko : Memang belum merata ya LDK, kita ada klasifikasi LDK, ada pemula, bahkan ada yang belum punya LDK, madya sama mapan. Dan itu masih banyak LDK yang awal-awal. Dan untuk pemberdayaan ya sangat, jadi khususnya itu di Sumatera, pasca FSLDK tumbuhlah LDK-LDK di Sumatera. Jadi perkembangannya pesat. Dari data yang kita dapatkan, laporan yang kita dapatkan. Kalau Jawa mungkin sudah masa selesai ya, pesatnya. Jadi kalau bagi secara geografis, FS Nasional di Jawa itu sudah sampai titik jenuh ya, terus banyak LDK yang bisa dikatakan mapan lah. Meskipun banyak yang swasta-swasta yang masih belum tergarap. Terutama masalah profesionalitas, LDK masih dalam tahap semua kalo itu, jadi masih belum selesai. Cuma sudah bisa dikatakan bisa mandiri lah. JS, UI, ITB, itu kan LDK-LDK mandiri dibandingkan yang lain. Di Sumatera, ini tumbuh Sumatera, dan besok di Kalimantan. Dan kita FS Nasional itu sebagai benar-benar media support.

Sahrul : MCP sendiri merupakan rekomendasi FS Nas?

Eko : Bukan. Itu rekomendasi syuro BP jadi FS Nas hanya merekomendasikan komisi-komisi A, isu nasional. Kita menangkap itu bersama BP-BP Puskomnas ini untuk merealisasikan ini gimana gitu, apakah kita reaktif saja, Puskomnas ada isu ini kemudian disikapi, atau ada yang lain. Kemudian muncul MCP itu. Jadi munculnya disini, di Syuro BP, pasca FS Nas. FS Nas tahun 2002 di Padang, bulan Juli tuh kita ketemu lagi Badan Pekerja, perwakilannya aja, gak semuanya.

Toni : Yang di Jawa aja?

Eko : Enggak. Di Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi, Meksar, jadi BP itu kita ambil perwakilan di beberapa daerah yang bisa mewakili wilayahnya.

Saleh : Oke, kita sudah sempet bicara idealisme kemudian realitasnya. Mungkin kalo kita coba berandai-andai ya, apa yang direncanakan secara formal. Puskomnas menyelamatkan MCP. Kira-kira mau diapain sih, terus ke arah mana?

Eko : Bukan menyelamatkan ya, tapi mengembangkan dan meningkatkan. Karena kalau diselamatkan kesannya *kelelep opo piye*. Jadi meningkatkan optimalisasi MCP itu, kita evaluasi sama JS kita intens. Bahkan kemarin rencananya akhwat Puskomnas mau ke JS.

Saleh : Pertengahan Mei itu?

Eko : Kurang tau, soalnya akhwat, dan saya belum dapat *reportnya*, sepertinya belum jadi

Sahrul : Saya nunggu-nunggu disana mas, hahaha..

Eko : Malah udah tau ya?

Saleh : Rencananya pertengahan Mei, katanya

Eko : Ya, itu untuk evaluasi MCP, mungkin lebih konkret ke program-program ya, ke depan seperti apa, sampai ke target-targetnya. Kemarin belum sempat. Memang ada program ya, jadi MCP baru sebatas konsep, terus juga untuk implementasi konsep itu, muncul di tengah perjalanan itu kita perlu program-program seperti buletin terus yang lain.

Saleh : Kalo bicara konkret, ada enggak yang akan dilakukan terkait dengan fungsi MCP. Program-program atau langkah konkret apa, sehingga MCP bisa optimal berjalan setahun ini, selama masa kepengurusan ini.

Sahrul : Apa dipindah kesini, atau...

Eko : Enggak, sementara kita masih, ya kita percayakan ke JS. Untuk tetap bisa mengoptimalkan itu, dan untuk ke depannya kita syuro' BP di Mataram bulan Juli ini.

Saleh : kita kan sempat diskusi di Al Manar. Kita mikir, kenapa nggak MCP itu sekalian membekali diri menjadi semacam *think tank*, dan seterusnya. Apalagi namanya keren. Kita memahami *media center* itu apa sih, pertama komponennya, adanya database. Misalnya database itulah yang akan dijadikan pijakan untuk melakukan respon, begitu. Kita kan khawatir kalau kita cenderung reaktif karena gak ada sebuah referensi yang jelas, yang valid. Pertama database, terus yang *kedua*, syarat kedua sebuah media center, disana terintegrasi antara kapasitas intelektual murni

dengan kapasitas riset. Yang *ketiga*, adanya jaringan yang kuat. Yaitu jaringan dengan pihak-pihak atau lembaga setipe. Kalau kita bicara level nasional ada CSIS, Cides, atau Jogja ada PPSK dan seterusnya. Kami sempat berandai-andai kalau misalnya MCP mau proaktif menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti itu, betapa cepatnya referensi bisa tersuplai, informasi terkini bisa nyampe, gitu yah...Mungkin ngga, ada kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah relatif mapan sehingga ada proses belajar disana. Kemudian yang *keempat*, Media Center itu bayangannya adalah adanya integrasi antara semua proses yang ada dengan teknologi informasi. Sementara yang kami lihat itu belum bisa dijalankan oleh MCP. Jadi teknologi informasi maksudnya basis dokumentasinya dalam hal ini MCP di JS cukup bagus, bisa diakses dengan mudah, mungkin internet oke, format CD misalnya. Kalau perlu memproduksi apa gitu. Kerjasama dengan radio yah, atau apalah.... Kita belum melihat itu. Mungkin ke depannya kayak apa

Eko : Ya itu masukan-masukan sebagai bahan masukan untuk MCP, ya ke depannya bisa jadi hal-hal seperti itu dilakukan.

Saleh : Tapi memang kalau selama ini, maaf, belum sampai kesana ya?

Eko : Belum. Kita gak mungkin langsung bisa cepat ya, butuh proses.

Sahrul : Kalo boleh saya tahu, pembahasan konsep MCP itu siapa aja yang hadir disitu? Dan sejauh mana pembahasannya. Karena saya sendiri dulu sempat ngerti proses-proses awal.

Saleh : Yang di JS itu ya?

Sahrul : Iya. Saya tidak intens memperhatikan, Cuma ada beberapa teman yang sempat mempertanyakan banyak hal. Saya pun setelah membaca ada banyak pertanyaan. Sampai kenapa misalnya, aksesnya harus Sabtu, apa hari Sabtu dikeramatkan? Hahaha...

Eko : Akses apa?

Sahrul : Yang dikonsep itu ada saya baca

Eko : Oh itu, ya di lapangan gak seperti berjalan seperti itu.

Sahrul : Artinya sebatas apa pembahasannya?

Eko : Saya juga gak ikut ya, kalo JS ..siapa ya.. mungkin ukhti Andina tahu?

Andina : Puskomnas.....Akh. Ahmadi. JS, ukhti Tia ada, Cuma beliaunya gak intens di forum. Akh Adi itu terus sama siapa namanya lupa. Ketuanya Akh Yanuar juga

datang. Cuma barengan dengan acara internal JS jadi beliau gak bisa ikut dalam pembahasan itu.

Eko : Ya yang jelas itu...

Saleh : Sekedar informasi buat akhwat, yang pake kacamata itu namanya Rahmat, Rahmat Resmiyanto. Jadi memang belum ada sebuah grand desain ke depan ya, tapi memang belum ada yang detail banget ya, kan ada anak ITB yang bisa support. Kami sempat mikir, aduuh..Al-Manär ini harusnya yang nerbitin FSLDK, dan secara teknis anak ITB bisa, *wong* kami ini yang *handle* anak HI, anak sospel lagi. Apakah memang belum ada ide-ide yang progresif kaitannya dengan IT itu dari temen-temen yang lebih banyak ke teknik, kayak temen-temen ITB, ITS mungkin.

Eko : Ada. Terlalu ideal dan akhirnya kita tunda. Sampai-sampai saya gak nyambung bicaranya. Jadi teknologi informasi yang saya juga gak nyambung, waktu pembahasan di Bandung itu. Dan saya gak bisa menjelaskan disini. Kapasitas otak saya belum nyampe. Intinya TI yang butuh dananya aja 1 M rupiah. Kurang tahu ya pemikiran temen-temen ITB yang saya juga gak nyambung. Sehingga ya mungkin baru tahun 2100 atau 2020 ya, tapi itu sempat tersampaikan di pembahasan SPMN tentang networking dan pengembangan jaringan. Jadi akhirnya itu gak kita tampilkan, yang kita tampilkan yang sederhana dan riil, masih bisa terjangkau oleh LDK-LDK Indonesia.

Saleh : Atau mungkin akhwat ada yang bisa menggambarkan lebih lanjut tentang yang di ITB itu?

Eko : Ukhti Kustiyah

Kustiyah: ya sebenarnya serius pas kita SPMN di Bandung. Ada saran itu untuk peningkatan komunikasinya. Sempat terlontar. Ya kita tau kemampuan dari anak-anak ITB ya, mereka menguasai tentang TI jaringan seperti itu. Emang pengen mewujudkannya, tapi setelah *direng-reng* biayanya, dari ITB sudah bisa menganggarkan seperti yang tadi dibilang Akh Eko, sangat besar sekali ya. Itu sebuah idealisme yang *pingin* kita wujudkan, tapi untuk sekarang-sekarang ini kita belum bisa. Kalau kita mau bikin kita harus memikirkan masalah dananya dulu. Untuk penjelasan lebih lanjut akhirnya kita ga bisa ya memunculkan sebuah idealisme yang sangat besar. Sementara kita sendiri dari sisi SDM amupun segi

materiilnya kita belum punya. Akhirnya itu di PR-kan, untuk ya.. wallahu'alam tahun kapan..

Andina : Nambahin ya Akh, mungkin kemarin penggunaan internet itu mulai Puskomnas UKMI ya Akh?

Eko : Yang jelas alur informasi mulai lancar itu mulai kepengurusan Puskomnas UNS.

Andina : Karena gini, kadang kita berpikir sebuah idealisme semacam itu ya, tapi kan ternyata kondisi jaringan FSLDK bukan jaringan yang kecil gitu lho. Jaringan seluruh Indonesia. Dan kendalanya jika kita menggunakan teknologi yang ..apa, contohnya saja internet. Tidak semua dari pelakunya, artinya anak-anak yang kompeten dalam jaringan ekstra kampus, anak-anak hubungan luar lah, tidak semuanya bisa menggunakan media itu. Nah sebuah realita yang sangat disayangkan. Dunia gituan sebenarnya kita udah jauh-jauh ketinggalan. Tapi memang itu sebuah relita yang harus kita pahami bersama gitu ya.. dan saya pikir kalau ngomong soal idealisme, kita semua punya idealisme itu ya, kita pengen bikin CD dan sebagainya. Dan saya lihat titik tekan Puskomnas terhadap jaringan tidak terlalu ke arah..., kalau pembuatan CD itu mungkin pernah tercetus. Tapi kembali lagi melihat SDM, contohnya saja pembuatan buku. Itu jelas menguras energi ya dan satu hal yang membuat paling jadi kendala, itu mungkin letak geografis ya, kalau mungkin satu kepengurusan JN UKMI satu tidak kerja itu bisa lah ditekan, tapi kalau sejauh hubungan antara LDK dan kita tidak punya struktur yang kuat untuk harus seperti ini, itu sebuah hal yang harus dimaklumi bersama.

Saleh : atau gini aja, FSLDK bekerjasama dengan Al-Manär . Kita bentuk jaringan yang murah meriah gitu. Hahaha...

Eko : Kalo untuk Al Manar. Mungkin tentang masalah-masalah seperti ini bisa gitu ya, tapi kalau sampai masuk ke jaringan itu nanti dimarahi LDK se-Indonesia.

Saleh : jadi begini, mungkin bisa bekerjasama. Kata kuncinya adalah kesediaan kita untuk berbagi, membangun bersama itu menjadi penting. Karena secara simple kita membuat CD ini, kita gak punya apa-apa, tapi kita berani start. Dan banyak pihak yang mem-*back-up*. Yang mungkin itu orang yang gak punya hubungan dengan kami. Dalam artian, kita gak punya hubungan struktural dengan manapun, tapi bisa. Nah LDK-LDK itupun lebih dari itu sebenarnya, nah jadi yang kami

ingin katakan, LDK maupun jaringannya FSLDK gak perlu berkecil hati dalam hal seperti itu.

Eko : Tadi itu ngga sekedar yang disampaikan akhwat ya, tapi pada system TI yang itu memang rumit dan saya sendiri juga gak bisa menangkap apa yang disampaikan.

Toni : Internet, telpon murah, dengan kabel yang serat optik dan lain sebagainya, itu memang 1 M lebih harganya.

Eko : Ya.. ya..heeh.. makanya idealisme semacam itu juga ada, artinya idealisme sebelum itu sudah mencapai tahap saat ini, dan sekarang kita sudah mencapai tahap seperti ini, artinya ke depan akan mencapai seperti itu dan nantinya sampai jaringan masjid kampus LDK se-Indonesia, pencet tombol satu langsung nyambung semua

Saleh : Langsung meledak semua

Sahrul : Al-Qaeda hahaha...

Eko : Jadi kekuatan jaringan kita sudah bisa dikatakan solid ya, kekuatan jaringan FSLDK nasional, kita masih berproses kesana. Apa yang jadi bahan masukan, evaluasi konstruktif ini menjadi bahan masukan berharga untuk LDK, gitu. Artinya sangat bermanfaat untuk LDK. Untuk masalah bagaimana penyikapan bagaimana bisa ini dan sebagainya, kita semua masih berproses kesana.

Saleh : Saya pengen ngasih ini ya, kalau ini benar-benar sharing, bukan dalam kerangka wawancara.

Toni : Satu hal yang menarik ya, CD adalah fasilitas paling mudah, dan sekarang kalo membangun jaringan internet masih mahal, itu dengan meng-copy CD, hanya dua ribu rupiah.

Saleh : Bayangkan kalo misalnya dokumen-dokumen di Solo, Yogya, di Jakarta itu bisa dengan cepat dibawa ke Jayapura, ke Maluku dan sebagainya. Makanya kita dalam rubrik Al Manar itu ada *Open Resources*, dokumen-dokumen apa, resources apa, bisa berupa tertulis, audio, video yang berguna untuk aktivitas dakwah atau keorganisasian itu ada di CD dan mudah digandakan, dibaca, diakses, dan seterusnya. Paling untuk edisi pertama kita baru beberapa LDK ya, kita punya harapan besar ke depannya akan ada banyak lembaga yang akan dengan sukarela berbagi, ini lho hasil kami, silahkan temen-temen pakai juga, dan kita saling kasih masukan, kasih nasihat dan kemudian kita maju, seperti itu. Dengan konsep open

resources kita benar-benar punya sebuah keinginan besar, bahwa kita terbuka, apa yang kita miliki bisa dibagi ke orang lain. Dan dari stok *resources* yang kita punya, ada sebuah pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan sesuatu yang konkret. Untuk kedepannya bisa jadi lah temen-temen LDK, FS menyuplai tulisan, apapun dan bisa kita distribusikan rame-rame. Atau kalo mungkin ini kita lagi nyari sponsor. Kan gampang to, CD dibawa kemana-mana gratis, kan enak.

Toni : Jadi alasan mendasar mengapa *open resources* itu penting adalah masalah ketimpangan informasi. Jika kemudian temen-temen yang di wilayah Jawa, LDK-LDKnya seperti di UGM, ITB, UI, itu LDKnya saling mengumpulkan informasi yang mereka miliki, entah itu kegiatannya, entah itu tentang sistem pengkaderan itu bagaimana. Dengan *open resources* diharapkan LDK-LDK yang masih tumbuh yang masih embrio itu bisa cepat mengejar gitu.

Eko : Ya FSLDK dari dulu saya pikir ada usaha-usaha *open resources*. Tapi sekali lagi masih proses. Temen-temen Jayapura gak mungkin kita kasih resources yang begitu memusingkan dari temen-temen yang di Jawa. Temen-temen yang di Ambon itu mikirnya jihad gitu gak ada pikiran bagaimana mengarsip data, dokumentasi, itu ngga. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kebutuhan tiap LDK-LDK itu juga beda-beda. Artinya *open resources* itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Artinya informasi merata bukan berarti berhasil, itu ngga. Kan gak cukup dengan keping-keping CD saja. Dan itu insya Allah ada di FSLDK gitu ya, *open resources*. Artinya ketika ada yang butuh konsep pembinaan ya kita kasih, akan tetapi sekali lagi kita masih pengumpulan untuk informasi-informasi gak semudah konsep yang kita bangun, gampang ini, kita kumpulkan ini terus diolah. Di lapangan, kita orang-orang lapangan yang sekarang juga masih bergelut untuk pengumpulan informasi. Kita insya Allah masih terus melakukan proses itu. Artinya *open resources* itu berproses, jadi gak sekedar konsep. Kalau Al-Manär mungkin belum merasakan di lapangan nasional LDK ya, jadi mungkin masih bergelut di bidang lain dan sudah berhasil mungkin, sudah ada output-outputnya gitu. Kita masih berproses ke arah sana. Yang SPMN itu salah satu usaha terkait dengan manajemen lembaga. Itu yang menjadi rekomendasi FS Nasional tahun kemarin, tahun 2002. Itu udah kita lakukan dan masih berproses. Sempat kepikiran mau di CD-kan juga, tapi kita lebih sepakat untuk dibukukan

karena lebih bisa riil gak Cuma LDK yang bisa akses, tapi bisa tersebar dimana-mana meskipun harus bayar ya. Pengennya kita ga bayar dulu itu, idealnya, tapi dikejar-kejar banyak LDK, cari dana sekian untuk mencetak gak ada gitu, kemudian kita masukan ke penerbit. Jadi Insya Allah terbit Juni, buku Risalah Manajemen Dakwah Kampus. Jadi pelatihan-pelatihannya sudah dilakukan nasional dan di daerah menindaklanjuti. Nasionalnya disini, September 2003. Pelatihan manajemen LDK Nasional, itu pesertanya Puskomda-Puskomda seluruh Indonesia. Dan mereka bisa hadir disini dan di daerahnya masing-masing mereka melaksanakan dengan bekal yang ada disini. Jadi itu usaha-usaha temen-temen LDK.

Sahrul : Jadi itu sebagai awalan sebenarnya, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa *share*kan mengenai *open resources*. Tapi sebelumnya saya memberikan ilustrasi ya, mengapa kita berasumsi bahwa *open resources* itu penting sekali, karena kalau kita menganggap bahwa peradaban barat lebih maju itu karena salah satunya penghargaan terhadap *open resources* itu, pendokumentasian terhadap apapun itu, baik itu sejarah, aktivitas dan lain-lain dengan begitu rapi. Saya pikir kita bisa melakukan itu. Saya juga setahun di bagian itu. Luar biasa *mumet* saya juga. Saya punya idealisme punya bank data dll, sebagian staf saya dulu dari bidang kearsipan itu luar biasa susah. Nah ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Sejauh mana sih Puskomnas atau dari sebelumnya itu melakukan usaha-usaha, punya bank data LDK seluruh Indonesia, kalo semisal punya sebatas apa saja?

Saleh : Misalnya sementara yang kami dapat masih terbatas, sementara kita belum dapat dokumen komplit tentang proceeding FS mungkin 5 atau sekian tahun yang lalu. Yang kedua, ada gak dokumen-dokumen yang dimiliki Puskomnas tentang LDK-LDK di seluruh Indonesia, bukan hanya sekedar daftar, tapi potensi, segala macam secara detail. Itu menjadi penting bagi kami. Karena kalau misalnya kita mau maju, kita harus punya database.

Eko : Data internal kita punya, dan itu untuk internal kita aja. Jadi kita gak *open resources* keluar. Jadi data LDK, terus apa yang sedetail-detailnya itu, proceeding LDK itu ya punya internal LDK.

Saleh : Kita bisa memahami kok kalau itu sebuah dokumen internal. Cuma yang ingin kita tanyakan apakah dokumen itu bisa dengan mudah biasa diakses, dipelajari,

dan seterusnya oleh sekian banyak LDK yang lain. Karena kita khawatir itu tidak. Begitu ya... jadi itu yang setidaknya kami amati, di JS pun itu gak ada dokumen selengkap itu. Nah, apakah kemudian UNS, Puskomnas sekarang punya dokumen selengkap itu

Eko : Insya Allah punya dan terdokumentasikan semuanya. Ya sudah, cukup itu saja.

Saleh : Pertanyaan lebih lanjut, apakah LDK-LDK kemudian bisa mengakses itu, mengakses yang dimaksud bukan hanya ketika mereka tanya, atau ini lho...

Eko : Kalau mereka minta, bisa

Saleh : Jadi bukan sebuah langkah proaktif, FSLDK membuat mekanisme seperti ini seperti ini, kalau butuh referensi dalam hal ini kita nyediain ini, bisa *copy* bisa gini..

Eko : Kita berpikir lebih ke langkah-langkah konkret ke depan ya, untuk analisis dokumen bukan gak dibutuhkan, gak terlalu penting atau perlu untuk LDK se-Indonesia. Jadi kita Puskomnas dari dokumen itu kita bisa mengambil kesimpulan dan BP untuk bagaimana ke depan.

Saleh : Apakah itu bukan sebuah elitisme?

Eko : Yah, mereka sudah dapat seharusnya di FSLDK Nasional

Saleh : Jika mereka sudah dapat, ada gak sebuah langkah aktif dari FSLDK untuk memfasilitasi mereka bahwa itu dokumen yang penting, mereka perlu mengkaji dan bukannya kemudian membiarkan “terserah mereka sudah dapat ya sudah” masalah kemudian *ilang* terserah.

Eko : Untuk LDK-LDK pemula memang masih belum memperhatikan dokumentasi, itu memang masih menjadi kelemahan. Itu makanya SPMN, diharapkan menjadi solusi. Disana ada masalah kesekeretarian untuk menyampaikan pentingnya dokumentasi. Jadi untuk masalah dokumentasi belum semua LDK merasa penting. Beberapa LDK saja yang sudah mapan, mungkin UI, UNS, mungkin UGM ya, orang-orang itulah, atau LDK-LDK itulah yang menjadi *think tank* untuk nasional. Jadi ITS ya, mereka tau seluk beluk FS Nas, bagaimana FS Nas ke depan itu seperti apa. Untuk LDK kayak LDK swasta, disini misalnya STAIN Surakarta, di Jogja mungkin STIE apa gitu. Data-data seperti itu mereka pusing internal dulu. Jadi disibukan dengan internal.

Saleh : Kalau saya kok mikirnya agak, beda ya, kalo apa yang disampaikan mas Eko tanpa sadar sebenarnya cara berpikir *top down* banget gitu ya, elitis banget.

- Toni : Seperti asosiasi antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga
- Saleh : “Jadi, kamu dunia ketiga kamu butuh ini, ini lho..kamu cukup SPMN”, kurang lebih itu, tapi tidak kemudian mengajak mereka "ini data mentah mari kita diskusikan, kita olah, kalau temen-temen belum punya dokumentasi yang bagus, gini caranya, ini lho pentingnya, ini jangan dibuang karena ini dokumen penting".
- Eko : Ya gak seperti itu ya, kita gak se-elitis itu. Masalahnya LDK-LDK kebanyakan itu masalah eksternal itu masih kurang. Belum memperhatikan masalah-masalah eksternal. Artinya fungsi jaringan belum terlalu ini, jadi fokus LDKnya masih internal. Jadi mikirkan jaringan keluar itu masih belum banyak porsinya. Nah tentunya kan gak kita paksakan. Dan itu yang terjadi di lapangan. Kita tahu pasti kebutuhan mereka. Kalau dilihat sekilas, antum dari luar ya
- Saleh : Nah, ketika mas Eko mengatakan “ kami tau pasti kebutuhan mereka” itu pun sebenarnya, dari *statement* itu sebuah statemen yang mengatakan "kami tau, anda gak tau, dalam artian kami tau kebutuhan mereka". Apakah kemudian mereka sudah terbantu untuk merumuskan kebutuhannya sendiri, jadi...
- Eko : Tiap daerah ya, itu ada forum daerah, kemudian kita juga mencoba untuk aspiratif ya, artinya sebenarnya kebutuhan LDK itu apa sih. Itu ga cuma kita aja, tapi ada informasi dari daerah, ada FSLDK Daerah, ada pendampingan di daerah, yang kemudian ternyata manajemen LDK di nasional itu masih banyak kekurangan, sehingga ada klasifikasi-klasifikasi macam itu. Kita ga top down full, tapi kita mencoba untuk aspirasi juga dari bawah dan itu kita lakukan. Jadi ada FSLDK Daerah, seperti di Solo ya, PJ-nya Puskomda UNS, adakan pertemuan LDK di daerah gitu, mereka sharing untuk permasalahan LDK-nya terus kita carikan solusinya. Misalnya kaderisasi kok mereka masih kesulitan, kita back-up. Jadi kita bicara realita, yang terjadi seperti itu, artinya ada LDK-LDK yang memang masih banyak kekurangan disisi internal. Target kita, bagaimana bisa meng up-grading mereka gitu.
- Toni : Jika bicara masalah kekurangan, saya menangkap adanya masalah yang cukup mendasar. Terutama tadi dikatakan mereka masih sibuk dengan internal. Tapi mereka sebenarnya kekurangan *sample*, *sample* yang bisa dijadikan acuan. Misalkan dokumentasi milik UNS, UI, ITB dijelenterehkan, mereka bisa melihat dan menggabungkan gitu. LDK-LDK yang masih baru.

Eko : Itu sudah di daerah

Toni : Mungkin saja Puskomda-Puskomda itu juga kekurangan *sample*, itu mau bagaimana gitu ya...

Saleh : Gini Mas Eko, *open resources* kita bedain antara dokumen yang internal, bener internal dan yang bisa keluar. Kalo yang internal bener internal kita menghormati itu seperti, kayak *proceeding* internal gitu yah. Yang kami angkat tadi, setidaknya fakta di lapangan, yang kami lihat itu berbeda. Jangankan LDK yang kecil, JS pun, JS gak punya referensi tentang mereka sendiri. Dokumen masa lalunya itu gak komplit. Apalagi kemudian mereka dapat dari UNS dari mana-mana. Malah mungkin temen-temen Al-Manär yang dapat. Dan kita yang sama-sama kemarin bukan dalam baju Al-Manär itu kita mem-*back up* habis-habisan di JS, ngajarin mereka dokumentasi kayak apa, mbuat proposal kayak apa, jadi maaf yah, ada sebuah *statement* yang beda di lapangan. Kita ngerti bener, LDK untuk operasional kegiatan sehari-hari mereka itu gak punya referensi.

Eko : Untuk operasional seperti itu, ya mungkin memang belum. *Open resources* yang sudah sangat komplit mungkin ya. Sampai ke *proceeding* kepanitiaan seperti apa, gitu ya, nggak ada.

Andina : Akh, yang di SPMN itu kan juga ada tentang manajemen syiar. Jadi yang menjadi titik perbedaan disini, kita beda titik tekan disini. Kalo saya lihat, karena meskipun FSLDK bentuknya jaringan, karena kita LDK ya, kita punya target untuk pemantapan LDK. Jadi mungkin tentang isu dan sebagainya itu sebuah efek samping yang tidak bisa kita hilangkan seperti itu. Yang *kedua*, kalau saya melihat, bagus sebenarnya konsepnya, tapi ya itu tadi, kalau tidak semuanya bisa di...

Eko : Maksudnya dokumen masing-masing LDK itu belum bagus, jadi untuk dikumpulkan jadi satu itu masih agak sukar.

Saleh : Nah, itu sebenarnya yang ingin kami tanyakan

Eko : Makanya dakwah dari manajemennya dulu, makanya kita kasih SPMN. Jadi karena mereka belum punya resources sendiri, tadi JS saja belum. Jadi yang punya resources baru beberapa, UI, ITB mungkin. Kadang untuk UNS sendiri, LPJ kegiatan itu kadang gak tergarap. Itu wajar, itu kepanitiaan. Makanya kita lebih ke konsep bagaimana membangun LDK yang professional dan progresif itu.

Saleh : Jadi ya maaf, mungkin dari temen-temen Puskomnas belum setuju ya, dengan istilah kami. Tapi sementara kami masih menangkap pendekatannya masih *top down*, karena misalnya tadi SPMN, bener produk dari Puskomnas ya, tapi kalau kita bayangkan kan *open resources* selain *top down* seperti itu kita bisa dari bawah. Kita bisa *bottom up*. Contohnya FSLDK bisa memfasilitasi dari LDK untuk...

\*\*\*

Eko : Al-Manär yang punya visi *open resources* seperti itu, itu konstruktif dan itu nanti akan kita coba.

Saleh : Jadi belum bisa ya, kayak misalnya aja proceeding, symposium kaderisasi itu kita belum bisa akses ya?

Eko : Karena itu kan ke LDK-an ya, dan Al-Manär bisa dikatakan di luar LDK, yang mencoba concern ke LDK. Tapi untuk data-data internal LDK itu tanggungjawabnya LDK untuk, ya tadi masukan-masukan dan evaluasi dan itu memang belum ada. Karena kendala-kendala teknis yang kita miliki, data-data itu masih susah kita dapat dari LDK daerah. Yah itu..

Saleh : Apakah dengan keterbatasan bahkan orang luar akses, itu kemudian ada sebuah keyakinan dari FS bahwa nanti ada sebuah proses *cross check* yang bagus, pengkritisan yang bagus, sehingga ada sebuah kemajuan. Kami percaya bahwa kalo *open resources* itu orang bisa saling mengingatkan, tapi kalo sebuah eksklusifitas data, hampir pasti, lima tahun yang akan datang akan tetap seperti itu.

Eko : Ya logikanya kan untuk LDK, evaluasi hanya antar LDK ya

Saleh : Jadi LDK hanya untuk LDK ya? Jadi bukan kemudian orang yang diluar dalam kategori formal LDK kemudian gak usahlah akses apalagi ngomong. Terus kemudian kalo ngasih kritik silahkan tak dengerin, tapi *yo wis*, tapi kita gak punya kesempatan untuk akses, kemudian sama-sama duduk bareng, oh ini lho kayak gini..kayak gini, itu memang belum?

Eko : Secara logika LDK terus FS itu gak bisa ikut ya orang luar. Hal-hal sebatas tulisan, informasi, itu bisa kita berikan, Cuma tentang *resources-resources* LDK itu cuma untuk LDK. Bukan berarti disebarluaskan kemana-mana. Kalo Al-Manär bisa punya JS, UNY.. ya mungkin karena Al-Manär punya temen-temen disana.